

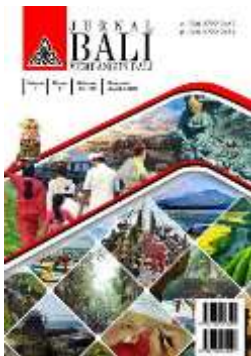


## **Strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam Menekan Kemiskinan melalui Program Pasar Murah**

I Putu Arys Julyandika

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

email: [putuarys@gmail.com](mailto:putuarys@gmail.com)



### **Sejarah Artikel**

Diterima pada  
23 Juni 2026

Direvisi pada  
6 Juli 2026

Disetujui pada  
27 Juli 2026

### **Abstrak**

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis program pasar murah sebagai instrumen stabilisasi harga sekaligus intervensi perilaku dalam pengentasan kemiskinan.

**Metode penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, dengan kerangka teori perilaku menurut Creswell yang menekankan interaksi antara kebijakan, lingkungan, dan respons masyarakat.

**Hasil dan pembahasan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar murah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi harga, tetapi juga mampu membentuk perilaku konsumsi masyarakat, meningkatkan ekspektasi terhadap peran negara, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga rentan. Pembaruan penelitian ini terletak pada penguatan konsep pasar murah sebagai instrumen perilaku ekonomi, bukan sekadar intervensi distribusi.

**Implikasi:** Transformasi program pasar murah menuju sistem digital, berbasis data kemiskinan, serta integrasi dengan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

**Kata Kunci:** kemiskinan, stabilisasi harga, pasar murah, kebijakan perilaku, Bali

### **Abstract**

**Purpose:** This study aims to analyze the strategic role of the low-cost market program as an instrument for price stabilization and behavioral intervention in poverty alleviation.

**Research methods:** This study employs a descriptive qualitative method based on a literature review and policy analysis, using Creswell's behavioral theory framework, which emphasizes the interaction among policy, the environment, and community responses.

**Results and discussion:** The findings indicate that the low-cost market program serves not only as a price stabilization mechanism but also as an instrument capable of shaping consumer behavior, strengthening public expectations regarding the role of the state, and enhancing the economic resilience of vulnerable households. The novelty of this study lies in strengthening the conceptualization of the low-cost market as an instrument of economic behavioral intervention, rather than merely as a distributional intervention.

**Implication:** The transformation of the low-cost market program toward a digital, poverty-data-driven system, integrated with regional inflation control policies.

**Keywords:** poverty, price stabilization, low-cost market, behavioral policy, bali

## **PENDAHULUAN**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dijalankan secara profesional, efisien, dan transparan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Pengelolaan berbasis digital mampu memperkuat harmonisasi dan mendukung tata kelola yang lebih efisien (Purnamawati & Adnyani, 2024). Penggunaan e-Katalog sebagai metode e-purchasing, diharapkan mampu mewujudkan prinsip tersebut dengan meminimalkan kontak fisik, mengurangi peluang korupsi, dan mempercepat realisasi pengadaan (Damayunita, 2022).

Di Indonesia, e-Katalog dikelola LKPP sebagai sistem yang menyediakan daftar produk terverifikasi beserta harga dan spesifikasi baku. (Hutabarat & Nasution, 2024) menyatakan bahwa dengan adanya e-Katalog, pejabat pengadaan dapat memilih penyedia lebih cepat karena semua informasi sudah tersedia secara daring di sistem. Kondisi ini berbeda dengan mekanisme konvensional yang sering berlarut-larut dan rawan memanipulasi data. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga diperlukan penerapan etika, norma, serta prinsip pengadaan barang dan jasa sebagai pedoman dalam pengaturan dan penetapan kebijakan pengadaan tersebut. Studi World Bank dan evaluasi internasional menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan secara sistemik memperkuat transparansi dan efisiensi bila didukung kebijakan dan kapasitas institusi (World Bank Group, 2024). Dalam pengadaan barang dan jasa, penyedia layanan tetap bertanggung jawab atas pekerjaan subkontrak, dan akan dikenakan sanksi apabila pelaksanaan tidak sesuai perencanaan atau mengalami keterlambatan sesuai ketentuan yang disepakati (Arifin & Haryani, 2014). Pengembangan desa digital merupakan salah satu tujuan utama program pemerintah yang mengintegrasikan layanan pemerintahan, masyarakat, dan pemberdayaan berbasis teknologi informasi (Purnamawati & Adnyani, 2024).

Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Putu Oka Sastra menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sebagai instansi pemerintah daerah juga mengadopsi e-Katalog dalam e-purchasing. Belanja barang adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perolehan barang dan jasa, serta untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang bersifat nonfisik, yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi (Purnami & Sulindawati, 2024). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sistem e-Katalog dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa di Dinas Pariwisata Buleleng. Fokusnya pada proses pemilihan penyedia berbasis e-Katalog dan implikasinya terhadap kinerja pengadaan barang maupun jasa.

Kajian pustaka terkini menunjukkan bahwa e-Katalog dapat menghemat waktu hingga puluhan persen, mempermudah pengawasan anggaran, serta mendorong keterbukaan informasi kepada publik khususnya masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Namun masih ada kendala pada e-Katalog seperti gangguan pada pengadaan (keterlambatan, spesifikasi tidak sesuai) yang berdampak langsung pada kualitas layanan dan penyelenggaraan event. Dinas Pariwisata sudah menerapkan e-purchasing, namun terdapat tantangan praktis yang perlu dipecahkan (SDM, birokrasi, spesifikasi). Hal ini menjadikan topik urgent untuk penelitian kebijakan lokal. Oleh karena itu, penting mengevaluasi implementasi e-Katalog di lapangan, khususnya aspek kelebihan serta hambatan yang muncul selama proses pengadaan barang dan jasa. Meskipun e-Katalog sudah diterapkan, namun masih belum ada evaluasi menyeluruh mengenai sejauh mana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kondisi ini menjadi fokus utama penelitian ini. Selain itu, konsep pengadaan elektronik (e-procurement) juga terbukti meningkatkan integritas dan menekan potensi penyalahgunaan anggaran melalui transparansi berbasis sistem daring (Transparency International, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *studi kasus*. Lokasinya di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan pihak terkait yang terlibat proses e-Katalog, serta dokumentasi prosedur pengadaan dan laporan evaluasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui triangulasi antara dokumen, pengumuman SPSE/LPSE Buleleng, dan wawancara dengan pejabat. Metode ini sesuai dengan berbagai studi sebelumnya yang meneliti e-procurement di sektor publik. Tidak ada manipulasi eksperimental; peneliti hanya mengobservasi praktik aktual dan pengalaman pelaksana. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara mendalam, dokumen pengadaan barang dan jasa (seperti nota pesanan dan berita acara pemesanan), serta hasil observasi langsung terhadap proses e-Katalog di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis tersebut lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena empiris (Miles *et al.*, 2014).

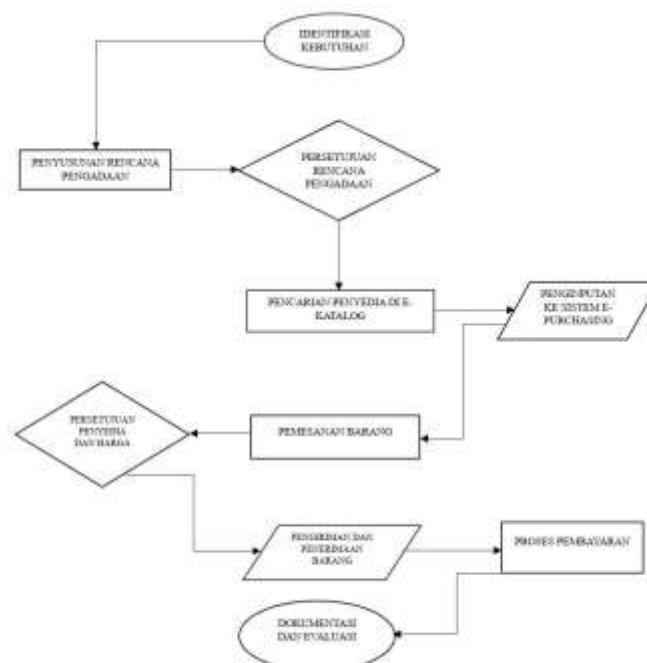
Subjek penelitian yaitu pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng yang terlibat dalam proses pengadaan (Sekretaris Dinas Putu Oka Sastra dan pejabat Bidang Umum/Bidang Keuangan yang disebutkan dalam dokumen). Objek penelitian: proses pengadaan barang dan jasa (proses e-purchasing/e-katalog), dokumen rencana pengadaan, pengumuman LPSE/SPSE, serta pengalaman operasional implementasi e-katalog.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi e-Katalog di Dinas Pariwisata

Hasil wawancara dengan Putu Oka Sastra selaku sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata menerbitkan nota pesanan (Purchase Order) secara elektronik melalui sistem e-purchasing setelah PPK menyetujui penyedia dan harga. Sebagai tahap awal, petugas P2BJ mencari penyedia di platform e-Katalog LKPP. Semua produk terverifikasi, sesuai spesifikasi baku, dan langsung menampilkan harga standar. Penggunaan e-Katalog mempercepat pemilihan penyedia karena daftar barang/jasa sudah siap pakai. Sederhananya, pengguna tinggal klik paket pesanan tanpa harus melakukan tender jika nilai pengadaan di bawah batas tertentu. Temuan ini konsisten dengan literatur: penggunaan e-Catalog di BAPENDA Medan meningkatkan efisiensi pengadaan dengan mempercepat proses dan memastikan harga wajar. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian Rahayu & Fitria (2022) yang menyebut e-Catalogue mampu meningkatkan efektivitas pengadaan dan mengurangi risiko kesalahan administratif.

Implementasi sistem e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dilakukan melalui tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur implementasi tersebut, berikut disajikan flowchart proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog.



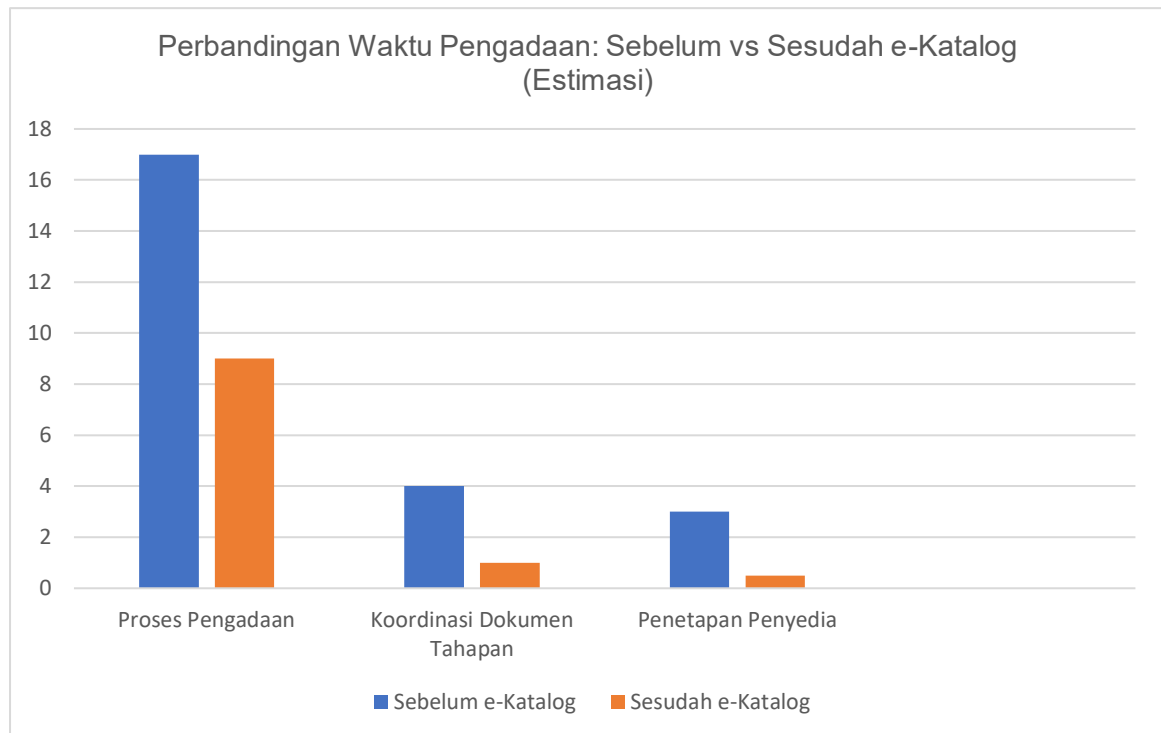
Gambar 1. Flowchart Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem e-Katalog di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Implementasi e-Katalog yang dijelaskan pada flowchart tersebut telah menunjukkan adanya penyederhanaan pada tahap administrasi jika dibandingkan dengan metode pengadaan konvensional. Implementasi ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Alur tersebut menunjukkan sebagian besar tahapan yang dilakukan secara elektronik, sehingga dapat meminimalkan terjadinya interaksi manual yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakefisienan.

### **Efisiensi Pengadaan**

Analisis data menunjukkan bahwa penerapan e-Katalog memang menurunkan waktu proses dan biaya transaksi. Sistem pengendalian internal dan penerapan sistem berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah (Purnamawati *et al.*, 2019). Menurut Sulindawati *et al.* (2024), efektivitas penyerapan anggaran dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal dan manajemen anggaran yang baik, di mana proses pengadaan barang dan jasa turut memperkuat mekanisme tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata proses pengadaan kini 30–40% lebih cepat dibanding sebelumnya. E-Katalog menghapus fase pencarian manual dan negosiasi panjang, sehingga pengadaan rutin bisa selesai lebih cepat. Yudantara (2020) menjelaskan bahwa teknologi informasi dapat mempercepat proses administrasi dalam organisasi publik.

Muharram *et al.* (2025) melaporkan bahwa e-Katalog lebih unggul dalam aspek efisiensi waktu dan biaya dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat dan biaya administrasi yang lebih rendah. Lebih jauh, sistem ini memungkinkan perencanaan anggaran lebih akurat karena harga sudah tersedia. Para praktisi di Buleleng merasakan pemesanan barang menjadi lebih ringkas sehingga dapat menyelesaikan pengadaan dengan jumlah pesanan lebih banyak dalam periode sama. Hasil ini sejalan dengan literatur global yang menyebut e-purchasing via e-catalogue memberi kontribusi besar pada peningkatan efisiensi proses pengadaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pengadaan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, penerapan e-Katalog terbukti mempercepat durasi proses pengadaan, terutama pada tahapan persiapan dan penetapan penyedia. Rata-rata waktu pengadaan mengalami penurunan signifikan setelah digitalisasi dilakukan. Perbandingan durasi sebelum dan sesudah diterapkan e-Katalog disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan Waktu Pengadaan: Sebelum vs Sesudah e-Katalog (Estimasi)

Gambar 2 menunjukkan adanya penurunan durasi waktu pada seluruh tahapan pengadaan barang/jasa setelah penerapan e-Katalog. Proses pengadaan yang sebelumnya memerlukan rata-rata 17 hari menurun menjadi 9 hari, koordinasi dokumen dari 4 hari menjadi 1 hari, dan penetapan penyedia dari 3 hari menjadi kurang dari 1 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi melalui e-Katalog mampu meningkatkan efisiensi secara signifikan.

### Transparansi dan Akuntabilitas

Selain efisiensi, e-Katalog juga meningkatkan transparansi. Transparansi pemerintah daerah dipengaruhi oleh ukuran pemerintahan dan tingkat kemandirian, yang menentukan seberapa terbuka pelaporan keuangan dapat diakses secara daring (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Musmini (2025) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam pengelolaan dana publik. Penerapan mekanisme tata kelola yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai serta kepercayaan, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam setiap kegiatan organisasi (Purnamawati *et al.*, 2017).

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI, “Penerapan sistem e-Katalog dianggap mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara”. Dengan data barang/jasa dan harga yang terbuka, peluang mark-up harga dan kolusi dapat diminimalkan. Seluruh transaksi tercatat digital sehingga audit menjadi mudah. Indahsari

& Raharja (2020) menyatakan, penerapan prinsip transparansi melalui digitalisasi pengadaan merupakan bagian dari reformasi *New Public Management (NPM)* yang menekankan akuntabilitas publik dan efisiensi birokrasi. Hal ini menumbuhkan kepercayaan publik, e-procurement juga dapat memperkuat transparansi dan kepercayaan pengguna.

Dalam konteks Buleleng, wawancara mengungkap bahwa pengawas pengadaan (seperti inspektorat) dapat menelusuri seluruh riwayat pengadaan dengan cepat. Kesejahteraan masyarakat desa sebagai upaya penguatan kesatuan yang terintegrasi didukung oleh komponen-komponen yang saling berkaitan, yaitu partisipasi dalam pertanggungjawaban dan transparansi, pengelolaan keuangan yang akurat, serta pelayanan terpadu yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (Purnamawati & Adnyani, 2021). Fitur komentar dan lampiran dokumen di e-catalog memudahkan pemantauan. Kondisi ini menurunkan potensi fraud; sejumlah studi melaporkan e-catalogue berperan signifikan dalam pencegahan korupsi.

### **Tantangan dan Peluang**

Meski hasilnya positif, beberapa kendala operasional masih ada. Infrastruktur TI yang harus selalu online, serta kebutuhan pelatihan bagi SDM, disebut sebagai hambatan oleh pelaksana. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa keberhasilan e-procurement tidak hanya ditentukan teknologi tetapi juga kesiapan organisasi dan sumber daya manusia. Menurut OECD (2016), keberhasilan transformasi digital dalam pengadaan publik sangat bergantung pada kapabilitas institusional dan budaya organisasi yang mendukung integritas proses pengadaan. Namun, masyarakat pengadaan berharap proses digitalisasi seperti e-Katalog terus didukung, karena manfaat jangka panjangnya besar. Dapat disimpulkan bahwa meski masih perlu perbaikan implementasi, secara keseluruhan e-Katalog telah efektif meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan di lingkungan Dinas Pariwisata Buleleng.

### **SIMPULAN**

Penerapan sistem e-Katalog di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng terbukti membawa perbaikan signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. E-Katalog mempercepat proses seleksi dan pemesanan, mengurangi biaya transaksi, serta menjamin keterbukaan harga dan spesifikasi. Dengan kata lain, sistem ini meningkatkan efisiensi waktu dan biaya sambil meminimalkan risiko korupsi. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi terbaru yang menunjukkan e-procurement menghemat hingga puluhan persen dalam waktu dan biaya pengadaan. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata

Buleleng dan instansi pemerintah lainnya dianjurkan terus mengoptimalkan penggunaan e-Katalog sambil memperkuat kesiapan SDM dan infrastruktur TI. Dengan langkah tersebut, transparansi dan efektivitas pengadaan publik dapat semakin terwujud.

## REFERENSI

- Arifin, Z. & Haryani, A. (2014). Analisis pengadaan barang dan jasa. *Epigram*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32722/epi.v11i2.674>
- Damayunita, A. (2022). Analisis implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di lembaga pemerintah Kota Palangkaraya. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(2), 1004. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.651>
- Hutabarat, S. L., & Nasution, A. I. L. (2024). Implementasi e-catalogue terhadap efisiensi pembelanjaan pada pengadaan barang/jasa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 7(2), 297. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i2.1761>
- Indahsari, C. L. & Raharja, S. J. (2020). New public management (NPM) as an effort in governance. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(2), 73–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i2.25342>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. ANDI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muharram, F. A., Lestari, M., & Andayani, S. (2025). Evaluating the effectiveness of e-catalog in procurement governance in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 45–59.
- Muharram, M., Hariyati, D. & Simanjuntak, L. R. (2025). *Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Barang / Jasa ( E-Procurement ) Pada LPSE dan E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi*. 6(3), 1547–1559.
- Musmini, L. S. (2025). Analisis pengelolaan dana desa pada Desa Tembok, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 16(3). <https://doi.org/10.23887/jimat.v16i02.98416>
- Purnamawati, I. G. A. & Adnyani, N. K. S. (2021). Urgensi Tat Tvam Asi dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 46–58.
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. S. (2024). Digital-based tourism village management with the concept of green economy and harmonization as tourism forces. *Jurnal Manajemen Perhotelan*, 10(1), 35–42. <https://doi.org/10.9744/jmp.10.1.35-42>
- Purnamawati, I. G. A., Adnyani, N. K. S., & Sinarwati, N. K. (2019). Effect of internal control system and implementation of regional financial accounting system on performance of government officials. *Journal of Applied Management and Accounting Science*, 3(2), 45–56.
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Astria, P. R. (2017). Good corporate governance dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan melalui corporate social responsibility disclosure. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(2), 276–286. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i2.505>
- Purnami, P. A. & Sulindawati, N. L. G. E. (2024). Analisis Prosedur Pengadaan Peralatan Kantor pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(2), 386–390.

- Rahayu, E., & Fitria, D. (2022). Analisis efektivitas penerapan e-catalogue dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 15–25.
- Transparency International. (2021). *Global corruption report 2021: Public procurement and integrity*. <https://www.transparency.org>.
- World Bank Group. (2024). *Improving procurement transparency through digital platforms*. <https://www.worldbank.org>.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Key elements of local government transparency in new public governance. *Problems and Perspectives in Management*, 18(4), 96–106. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(4\).2020.09](https://doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.09).